

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Literatur Reviu

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah tentu tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga perlu adanya perbandingan dengan penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh peneliti lainnya. Pada bagian literatur reviu ini berisi tentang uraian teori, temuan, tulisan, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang sedang peneliti bahas. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dari kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun literatur-literatur yang diperoleh dari penelitian sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, kanal berita, laporan penelitian, dan sumber digital lainnya. Dalam penulisan literatur reviu ini peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai kerja sama *sister city* Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam menghadapi isu lingkungan hidup, khususnya adalah dalam bidang *waste management*.

Selain itu, fungsi dari literatur reviu adalah untuk menjelaskan secara rinci antara variabel bebas, variabel terikat serta korelasinya antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, penulisan literatur reviu ini juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan plagiarisme. Berikut beberapa literatur reviu yang

dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis dalam menyusun penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tentang “*Alasan Bandung Melakukan Kerja Sama Sister City dengan Kawasaki, Kanagawa Prefecture, Jepang (2015-2017)*” oleh Reliza Onidema Miskatu Fitri pada tahun 2018.

Penelitian ini menganalisis bahwa Kota Bandung telah melakukan kerja sama *sister city* dengan berbagai kota yang berada di luar negeri. Hal tersebut merupakan bentuk upaya optimalisasi Pemerintah Kota Bandung dalam merespon perkembangan yang terjadi, pertumbuhan pembangunan, serta naiknya laju urbanisasi. Namun ditengah pembangunan yang marak dan aktivitas manusia yang semakin padat, telah menyebabkan dampak buruk terhadap degradasi lingkungan. Maka dari itu, Kota Bandung harus melakukan berbagai upaya dalam mengelola lingkungannya, salah satunya adalah melalui kerja sama *sister city* dengan berbagai kota yang berhasil dalam mengatasi permasalahan yang cenderung serupa.

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada alasan Kota Bandung menerima tawaran kerja sama dengan Kota Kawasaki. Menurut hasil analisis tersebut, kerja sama Bandung dengan Kawasaki diharapkan dapat membawa dampak baik untuk mencapai kecakapan Bandung di bidang lingkungan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dengan yang peneliti tulis, yaitu mengenai kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Kawasaki di Bidang Lingkungan Hidup dan alasan keduanya melakukan kerja sama. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis. Jika dalam penelitian diatas, membahas

mengenai aspek lingkungan yang lebih variatif, seperti *low carbon development*, manajemen air limbah, dan manajemen limbah.

Penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih spesifik, yaitu membahas kerja sama diantara keduanya dalam pengelolaan atau manajemen sampah yang menjadi polemik Kota Bandung sampai saat ini.

*Kedua* tentang “*The Government of Bandung City Efforts in Utilizing Foreign Sources: Case Study in Sister City Cooperation*” oleh RMT Nurhasan Affandi, Gilang Nur Alam, dan Windy Dermawan pada tahun 2020.

Penelitian ini menganalisis bahwa kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Kawasaki ini, dapat membantu percepatan pembangunan daerah di Kota Bandung di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Kerja sama yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Menurut peneliti diatas, upaya kerja sama tersebut peneliti merupakan bentuk *local branding* Kota Bandung yang menunjukkan kemampuannya dalam mengambil peran dalam politik global.

Melalui kerja sama ini, peneliti diatas menjelaskan bahwa Kota Bandung telah memanfaatkan kerja samanya dengan Kota Suwon melalui program pembangunan infrastruktur yaitu restorasi sungai, sanitasi, dan lainnya. Namun, upaya kemandirian Kota Bandung agar tidak bergantung pada pemerintah pusat juga diperlukan alternatif dan elemen lain seperti pengusaha swasta, yang terlibat agar program pengembangan daerah dapat lebih optimal.

Pembahasan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, karena penelitian di atas membahas kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai program kerja sama yang dilakukan dalam bidang lingkungan. Namun juga memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang menguraikan bahwa kerja sama *sister city* ini bukan hanya melibatkan *government-to-government*, tetapi melibatkan beberapa lembaga yang menjadi tongkat estafet dalam membantu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

*Ketiga, "Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung: Nilai Tambah dan Potensi Ekonomi"* oleh Indartik, Elvida Yosefi, Suryandari, Deden Djaenudin, dan Mirna Aulia Pribadi pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisa di atas menguraikan bahwa permasalahan lingkungan akibat sampah yang terus meningkat membawa dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan dan sosial ekonomi. Peningkatan volume sampah berkaitan berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas perekonomian, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Uraian tersebut selaras dengan arah penelitian yang akan penulis angkat mengenai akar permasalahan penumpukan sampah yang terjadi di Kota Bandung.

Lebih lanjutnya, penelitian di atas mengulas mengenai penanganan sampah di Kota Bandung mengacu pada peraturan tingkat pusat dan daerah yang mengubah kewenangan kebersihan kota dari PD Kebersihan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Hal ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan sumber daya alam di masa perpindahan kewenangan tersebut. Selain itu peneliti di atas juga

berpendapat bahwa adanya potensi ekonomi dari pemanfaatan sampah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan penanganan sampah yang masih terbatas.

Pembahasan diatas memiliki, perbedaan, karena penulis tidak hanya membahas mengenai penanganan sampah di Kota Bandung. Tetapi membahas aspek lain mengenai pengaruh kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penulis juga cenderung membahas aspek kerja sama lingkungan daripada analisis kajian pembiayaan dan potensi pemanfaatan sampah di Kota Bandung.

*Keempat, “Kerja sama Green Sister City Surabaya dan Kitakyushu (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Melalui Super Depo Sutorejo”* oleh Monalisa Bonieta Octavia pada tahun 2017.

Penelitian tersebut membahas mengenai kerja sama *sister city* Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu yang dilatarbelakangi oleh keberhasilan Kitakyushu menjadi *low carbon city* sehingga dijadikan sebagai *role model* bagi Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis ramah lingkungan. Karena keberhasilan Kitakyushu, Surabaya banyak mengadopsi model pengelolaan lingkungan salah satu kota di Jepang tersebut.

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa Kota Surabaya menjadi kota di Indonesia yang berhasil dalam mengelola sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Keberhasilannya dilatarbelakangi oleh peran aktif seluruh perangkat kota, baik dari tingkat pemerintah hingga masyarakat setempat.

Hal serupa juga menjadi bahasan penulis mengenai motivasi Kota Bandung yang memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan Kota Kawasaki karena

keberhasilan kota di Jepang tersebut dalam mengatasi permasalahan lingkungan domestiknya. Terdapat kesamaan lain dalam penelitian penulis yang mengkaji mengenai kerja sama luar negeri terkait pengelolaan sampah di tingkat regional.

Hanya saja dalam penelitian diatas, yang menjadi aktor utama dalam kerja sama tersebut adalah Kota Surabaya di Indonesia dan Kota Kitakyushu di Jepang, sedangkan aktor utama yang terlibat dalam penelitian penulis adalah Kota Bandung dan Kota Kawasaki di Jepang.

*Kelima, "Permasalahan Sampah Kota Bandung dan Alternatif Solusinya"* oleh Wahyu Surakusumah pada tahun 2008.

Dalam tulisan tersebut, peneliti diatas menyimpulkan bahwa permasalahan sampah di Kota Bandung menjadi isu yang kompleks. Maka dari itu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan budaya dan koordinasi yang kuat oleh pemerintah kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara administratif maupun teknis. Sehingga, diharapkan dari adanya integrasi antar elemen dan konsistensi kesepakatan yang ada dapat menjadi solusi atas permasalahan sampah yang terjadi.

Hal ini menjadi selaras dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti dalam bidang lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Kota Bandung dan menjadi sebuah solusi yang menarik bahwa antar elemen saling melengkapi kebutuhan dan kepentingannya dalam sebuah kerangka kerja sama. Hanya saja, peneliti membahas cakupan yang lebih luas, yaitu bukan lagi pada tingkat regional, namun sub-nasional antar negara.

Keenam, “*Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional*” oleh Takdir Ali Mukti pada tahun 2015.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam bingkai hubungan internasional, paradiplomasi merupakan sebuah fenomena bangkitnya aktor-aktor lokal di panggung internasional. Fenomena paradiplomasi menjadi eksis di era otonomi daerah, yang merupakan simbol perubahan pola internal pemerintah daerah yang mulanya bersifat “*inward looking*” menjadi “*outward looking*”.

Dalam pembahasan penelitian tersebut mengkaji mengenai beberapa studi paradiplomasi di berbagai region seperti Eropa, Kanada, dan Korea Selatan yang kemudian dilakukan perbandingan operasional untuk meninjau permasalahan di Indonesia melalui kerangka paradiplomasi yang dimainkan oleh aktor-aktor transnasional.

Pemerintah tingkat kabupaten atau kota yang menjadi *sub-state* dalam hal ini perlu meninjau tindakan operasional paradiplomasi yang harus didasarkan pada kepentingan fundamental domestik wilayahnya. Uraian penelitian ini berada dalam posisi horizontal dengan penelitian penulis, yang menekankan kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh kedua aktor subnasional, yaitu Kota Bandung dan Kota Kawasaki dalam menghadapi permasalahan fundamental- lingkungan yang terjadi.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah, tidak menguraikan mengenai praktik-praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh berbagai region. Namun hanya memfokuskan pada paradiplomasi diantara dua aktor subnasional, yaitu Kota Bandung dan Kawasaki.

## **2.2 Kerangka Teoritis/ Konseptual**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas untuk dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu, didalam sebuah penelitian diperlukan suatu landasan teori atau konseptual untuk memperkuat suatu analisa, mempermudah peneliti dalam menganalisa suatu masalah, serta dapat mengarahkan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang konsisten. Selain itu, untuk memahami diskursus dalam Hubungan Internasional yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat penulis.

### **2.2.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara, yang didalamnya meliputi aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional juga dapat berupa subyek teoritis dan subyek praktis atau subyek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya yang dapat bersifat empiris, normatif, atau bahkan keduanya. Seperti sistem sosial pada umumnya, hubungan internasional memiliki *output* untung dan rugi bagi partisipannya, sebab studi ini membicarakan mengenai input berupa sifat dan output berupa konsekuensi atas interaksi yang terjadi didalamnya. (Jackson & Sorensen, 2014).



Sebagai studi yang tidak terlepas dari subjek teoritis dan praktis, hubungan internasional berkaitan erat dengan interaksi antar aktor yang terlibat. Charles Kegley dan Eugene Wittkopf dalam bukunya yang berjudul *International Relations in Perspective* menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut: “Hubungan Internasional adalah interaksi antar aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar yurisdiksi efektif unit politiknya”. (Kegley & Wittkopf, 1997: 4-6).

Definisi tersebut dapat dimaknai bahwa negara-bangsa dipandang sebagai aktor utama dari hubungan internasional. Hal ini dikarenakan tindakan serta konsekuensi dari interaksi tersebut adalah unit politik, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan atau interaksi antar negara dilakukan oleh aktor-aktor non-negara.

Sedangkan menurut Perwita dan Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, menyatakan bahwa: “Hubungan internasional didefinisikan sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas wilayah suatu negara antar aktor. Baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian yang mengenai kondisi-kondisi relevan yang mewarnai diskursus tersebut”. (Perwita & Yani, 2017: 8).

Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah maupun non-pemerintah dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk merespon segala bentuk peluang dan hambatan yang terjadi sehingga dapat memberikan pengaruh satu sama lain. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat berbentuk kerja sama, persaingan,

negosiasi, hingga memungkinkan untuk terjadi gesekan konflik antar aktor. Hal ini dipengaruhi karena adanya kepentingan nasional yang dibawa dari masing-masing aktor. Subjek-subjek kepentingan nasional dalam hubungan internasional tidak hanya sebatas pada subyek politik, namun meliputi subjek lain seperti ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, gender, keterbelakangan, lingkungan hidup, dan lain-lain. (Perwita & Yani, 2017: 8).

### **2.2.2 Neoliberalisme**

Neoliberalisme berangkat dari cara pandang melihat realitas yang ada mengenai optimisme terhadap kemungkinan kerja sama dibawah sistem internasional yang anarkis. Dalam situasi hubungan internasional yang kompetitif, aktor-aktor yang terlibat akan berupaya memaksimalkan tujuannya agar mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan pihak lain. Kondisi ini akan menciptakan situasi interdependensi yang terbentuk dengan sendirinya setelah kerja sama yang terbangun terjalin dengan erat. Organisasi internasional dan setingkat institusi lainnya dapat menjadi media yang memfasilitasi adanya kerja sama antar negara maupun aktor yang saling menguntungkan.

Di dalam panggung politik internasional yang kompleks saat ini, tidak hanya interaksi formal antar elit pemerintah yang menjadi saluran penghubung, akan tetapi interaksi antar elit informal, non-pemerintah, organisasi internasional, serta institusi terkait lainnya lambat laun berperan menjadi *transmission belts* untuk membuat melakukan kerja sama, membuat kebijakan untuk membahas isu-isu domestik maupun internasional. (Dugis, 2016: 107-109). Dalam analisa penelitian ini, penulis melihat bahwa kerja sama yang terjalin antara Kota Bandung dan

Kawasaki telah melibatkan berbagai pihak-pihak internalnya untuk berpartisipasi dalam mendukung keberlangsungan kerja sama yang terjadi antar keduanya. Kehadiran berbagai pihak-pihak dari Bandung dan Kawasaki menjadi penting sebagai kolektif untuk melakukan mitigasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung.

### **2.2.3 Kerja Sama Internasional**

Interaksi yang terjadi antar aktor dalam hubungan internasional dapat menciptakan sebuah output, salah satunya adalah kerja sama internasional. Bentuk kerja sama internasional yang terbentuk bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara, tetapi juga merupakan sebuah upaya penggabungan keterbatasan kapabilitas masing-masing aktor. Dengan demikian, melalui dari kerja sama internasional inilah tujuan nasional negara dapat tercapai. Kerja sama didefinisikan menurut K.J Holsti sebagai berikut:

*Proses kerja sama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan kompleksnya permasalahan nasional, regional maupun global, yang muncul dan memerlukan atensi dari negara lain. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa solusi permasalahan, mengkolektif bukti-bukti tertulis guna membenarkan suatu solusi atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak”.. (K.J Holsti, 1992).*

Dalam hubungan internasional, kerja sama internasional merupakan refleksi atas beragam kepentingan nasional yang dibawa oleh suatu negara dan pada dasarnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki menyepakati kerja sama *sister city* melalui penandatanganan MoU di tahun 2016, untuk berkolaborasi dalam menangani

permasalahan lingkungan hidup. Keduanya memiliki tujuan penting dalam kerja sama ini. Pada dasarnya pemerintah Kota Kawasaki melihat bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung cenderung serupa dengan apa yang pernah terjadi di Kawasaki. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kawasaki ingin agar Kota Bandung dapat keluar dari permasalahan tersebut.

Dibalik keterbatasan yang dimiliki oleh Kota Bandung menjadikan kondisi tersebut sebagai sebuah peluang kerja sama kedua kota tersebut. Melalui kerja sama *sister city*, Kawasaki sebagai Kota yang dianggap lebih mapan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, ingin memberikan bantuan berupa transfer teknologi, dan beberapa solutif lainnya melalui pelatihan, seminar, *workshop*, dan lain-lain.

Isu lingkungan hidup dalam studi hubungan internasional, dewasa ini telah mendapat banyak perhatian dalam diskursusnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh dampak yang diberikan atas permasalahan tersebut-mengancam keberlangsungan hidup bumi dan makhluk hidup didalamnya. Sehingga diperlukan *action* yang tepat dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

#### **2.2.4 Konsep Paradiplomasi**

Paradiplomasi merupakan sebuah fenomena dan subyek yang terbilang baru dalam studi hubungan internasional. Istilah tersebut, pertama kali muncul pada tahun 1980-an yang berawal dari sebuah diskusi akademik oleh ilmuwan yang bernama Panayotis Soldatos. Mulanya, paradiplomasi merupakan sebuah istilah gabungan "*parallel diplomacy*" yang pada akhirnya menjadi "*paradiplomacy*". (Aldecoa dalam Mukti, 2015)

Paradiplomasi merupakan sebuah konsep yang mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri pemerintah daerah secara otonom- dapat membangun interaksi dengan pihak internasional dalam rangka memenuhi kepentingan daerahnya. (Wolff, 2007: 1). Kemunculan paradiplomasi merupakan konsekuensi atas globalisasi, yang merefleksikan bahwa dewasa ini bukan hanya *state actor* yang dapat menjadi “pemain utama” dalam panggung internasional, namun kemunculan *non-state actor* telah membawa diskursus baru bagi studi hubungan internasional.

Dengan hadirnya *non-state actor*, salah satunya adalah pemerintah daerah, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan negara. Fenomena paradiplomasi menjadi sebuah jembatan penghubung bagi aktor-aktor subnasional untuk bangkit di forum internasional diluar batas negara, tanpa adanya intervensi penuh dengan pemerintah pusat. Kehadiran aktor-aktor subnasional menjadi indikasi bahwa telah rapuhnya kedaulatan negara secara fundamental. Mengapa demikian, sebab di masa sistem westphalia, kedaulatan negara berada secara penuh di tangan pemerintah pusat, namun kini pemerintah pusat harus membagi kedaulatan tersebut dengan aktor-aktor subnasional lainnya sebagai “pemain lain” dalam aktivitas internasional. (Wolff, 2007: 2).

Dalam ranah internasional normalisasi aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh sub-negara memungkinkan sistem diplomatik beroperasi di area yang semakin kompleks. Fenomena diplomasi sub-negara, telah dideskripsikan bahwa normalisasi diplomasi tersebut telah menjadi sebuah inovasi baru untuk menekankan keterlibatan yang semakin besar dari pemerintah sub-negara dalam lingkup internasional dan tidak diragukan lagi kekuataannya. Intervensi sub-negara

dalam ranah diplomatik yang pernah dianggap luar biasa atau menyimpang menjadi normal, hanya karena praktik, institusi, dan wacana mereka semakin meluas di seluruh dunia dalam konteks kelembagaan yang paling berbeda dan dengan cepat mengubah persepsi dan sikap dalam diplomasi konvensional sistem itu sendiri.

Diplomasi sub-negara bukan hanya hasil yang ditentukan dari kondisi struktural tertentu. Itu selalu merupakan bentuk agensi politik yang mengungkapkan kemauan politik untuk pengakuan yang lebih besar di ranah internasional, serta penegasan otonomi institusional dalam konteks yang semakin kompleks. Selain itu, kemampuan beradaptasi menunjukkan proses yang cukup unik dari inovasi kebijakan transnasional dan pembelajaran bersama dengan pemerintah sub-negara bagian. Ini mengungkapkan kapasitas untuk adaptasi reflektif terhadap perubahan konteks struktural dan yang juga memfasilitasi pengakuan institusional yang berkembang oleh sistem diplomatik. (Neo, 2009: 1-2).

Dalam analisis Duchaeck, praktik diplomasi sub-negara atau yang disebut, paradiplomasi diklasifikasikan lagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

### **1. Transborder Paradiplomacy**

Transborder paradiplomacy terjadi ketika adanya interaksi atau hubungan kerja sama yang dilakukan oleh antar aktor subnasional yang berbatasan langsung secara wilayah geografis

## **2. Transregional Paradiplomacy**

Transregional Paradiplomacy terjadi ketika adanya interaksi atau hubungan kerja sama yang dilakukan oleh antar aktor subnasional yang berada dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung secara wilayah geografis.

## **3. Global Paradiplomacy**

Global Paradiplomacy terjadi ketika adanya interaksi atau hubungan kerja sama yang dilakukan oleh antar aktor subnasional dalam wilayah kawasan yang berbeda. (Damayanti, 2012: 2).

Jika ditinjau dari ketiga bentuk konsep paradiplomasi diatas, kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kota Kawasaki masuk kedalam bentuk yang ketiga, yaitu *global paradiplomacy*. Hal ini dikarenakan antara Kota Bandung yang merupakan bagian Negara Indonesia dengan Kota Kawasaki yang merupakan bagian Negara Jepang berada dalam kawasan yang berbeda. Indonesia berada dalam sub regional Asia Tenggara. Sedangkan Jepang berada dalam sub-regional Asia Timur.

### **2.2.5 Konsep Sister City**

*Sister city* atau kota kembar dapat didefinisikan sebagai bentuk kemitraan dua kota dari negara yang berbeda yang didasarkan pada pemahaman budaya dan sosial untuk mencapai dialog kepentingan diantara keduanya. Pada umumnya, hubungan *sister city* ini bergerak dalam ranah perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi antara dua negara di tingkat lokal. (Tuzin, dkk,2008: 5-6).

Kerja sama *sister city* juga dapat didefinisikan sebagai langkah yang diambil oleh kotamadya untuk menyalurkan kepentingan mereka di tingkat internasional (Vion, 2002: 640). Kemunculan *sister city* dipicu pasca peristiwa Perang Dunia Kedua, yang pada saat itu kota-kota membentuk hubungan satu sama lain untuk melakukan “*sharing*” pengalaman perang yang menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian. (Tuzin, dkk, 2008: 7).

Di Kawasan Eropa, pergerakan *sister city* dikenal sebagai “*Town twinning*” atau “*jumelages*” dan perkembangannya mengalami percepatan selama masa pembangunan Uni Eropa yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat di Eropa.
2. Bertukar pengalaman, dan
3. Mengembangkan proyek bersama mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti integrasi lokal, pembangunan ekonomi, budaya, dan lingkungan. (EU, 2004).

Secara general *sister city* merupakan bentuk kerja sama internasional di tingkat lokal yang ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak yang terlibat - menghasilkan sebuah hubungan yang berkelanjutan antar pemerintah lokal di masing-masing negara. Dalam pelaksanaannya, kerja sama *sister city* di Indonesia harus didasarkan pada peraturan dan tata tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.



### 2.2.6 *Green Theory*

*Green Theory* atau Teori Hijau muncul dalam diskursus hubungan internasional pada tahun 1960-an, ditengah kelangkaan sumber daya alam pasca peristiwa Perang Dingin. *Green Theory* membantah bahwa negara dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi secara berkelanjutan. (Paterson, 2001: 277).

Kaum Teori Hijau mengkonsepsikan bahwa kehidupan berpusat pada lingkungan, bukan pada manusia, yang kemudian pemikiran ini disebut sebagai paham ekosentrisme. Teori ini mengamini bahwa suatu negara tidak bisa mengatasi permasalahan lingkungan, oleh karenanya negara harus melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mengatasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup bukan menyoal pada dampaknya- kerugian bagi suatu negara, melainkan memiliki eskalasi yang lebih luas yaitu pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lain seutuhnya.

Dalam pembahasan lain, hubungan internasional telah mengakui bahwa lingkungan menjadi disiplin ilmu yang membutuhkan perhatian teoritis maupun praktis- terutama setelah maraknya bukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia secara signifikan mengubah iklim global dan memunculkan masalah keamanan dan ekologi. (Dyer, 2018: 1-3)

Jika ditinjau melalui teori hijau dan dikaitkan dengan topik penelitian yang diangkat, permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung sebagian besar berasal dari sampah. Kondisi ini dilatarbelakangi karena kapasitas Kota Bandung masih belum mumpuni, meskipun telah banyak program-program yang digagas. Selain itu tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih rendah. Melalui

teori ini, dengan adanya kerangka kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Kawasaki diharapkan akan mempermudah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung. Sehingga Bandung dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan.

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Kerja Sama *Sister City* Bandung – Kawasaki di bidang lingkungan hidup melalui waste management system, akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas Kota Bandung dalam mengelola sampah. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah produksi sampah Kota Bandung”**.

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

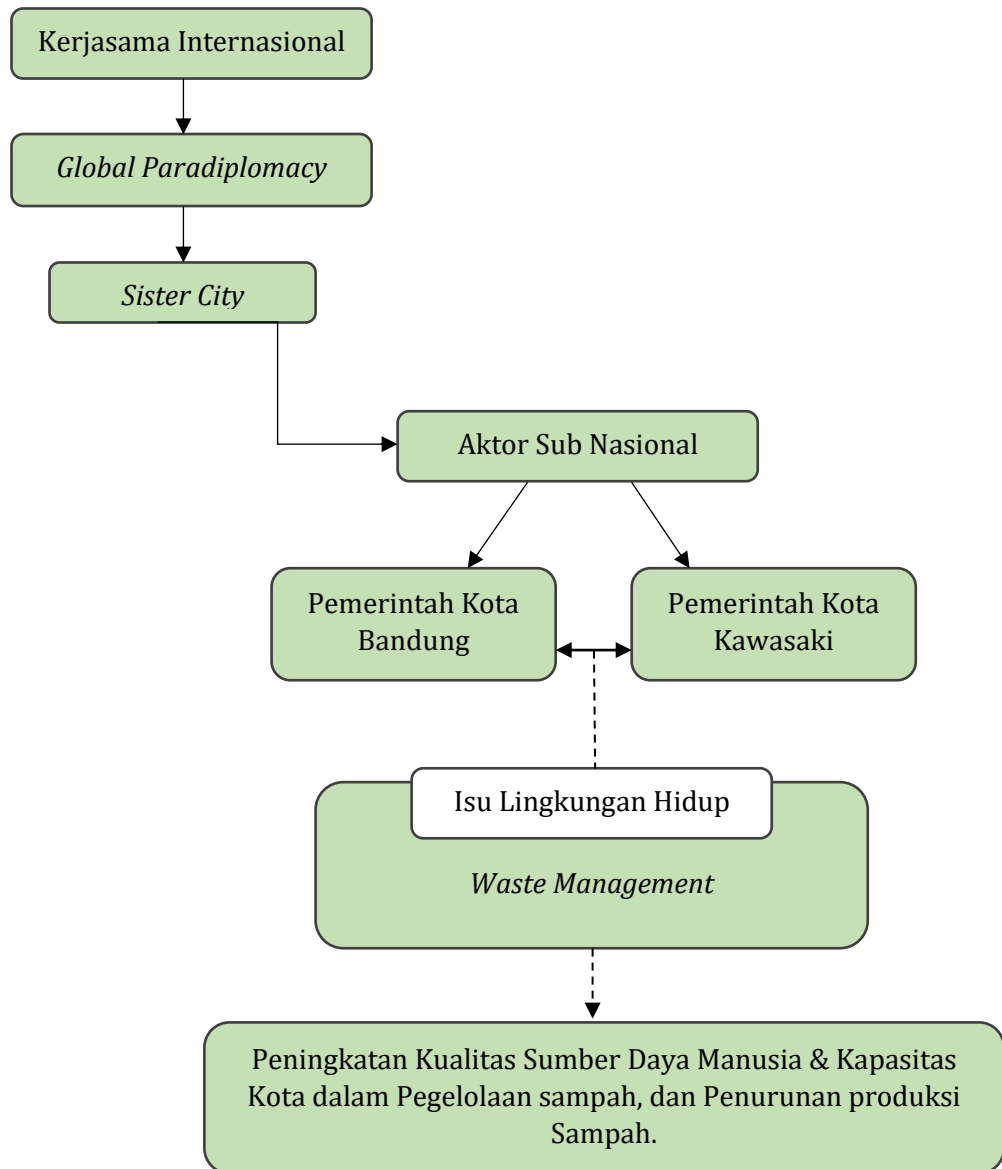
Tabel 2.4 1 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Varibel Bebas:</p> <p>Kerja Sama <i>Sister City</i> Bandung – Kawasaki di bidang lingkungan hidup melalui <i>waste management system</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesepakatan kerja sama antara pemerintah Kota Bandung dengan Kota Kawasaki dalam bidang lingkungan hidup.</li> <li>2. Kerangka kerja sama dalam bidang lingkungan hidup</li> <li>3. Kesepakatan kerja sama teknologi pengelolaan sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan LoI antara pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki dalam skema JCM pada tahun 2015. Dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU pada tahun 2016. <b>Draft MoU terlampir</b></li> <li>2. Skema JCM. <a href="http://jcm.ekon.go.id/en/uploads/files/Document%20JCM/Presentation/Update%20on%20JCM%20presentation/Skema_Sister_city_dalam_JCM.pdf">http://jcm.ekon.go.id/en/uploads/files/Document%20JCM/Presentation/Update%20on%20JCM%20presentation/Skema_Sister_city_dalam_JCM.pdf</a></li> <li>3. Kunjungan Pemkot Bandung Ke Jepang dalam menyepakati kerja sama</li> </ol>

		<p>teknologi pengelolaan sampah.</p> <p><a href="http://kilasbandungnews.com/2020/02/lawatan-ke-jepang-kota-bandung-dan-kawasaki-sepakati-kerja-sama-teknologi-pengelolaan-sampah/">http://kilasbandungnews.com/2020/02/lawatan-ke-jepang-kota-bandung-dan-kawasaki-sepakati-kerja-sama-teknologi-pengelolaan-sampah/</a></p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas Kota Bandung dalam mengelola sampah. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah produksi sampah Kota Bandung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi dan kontinuitas program-program pengelolaan sampah di Kota Bandung.</li> <li>2. Laju penumpukan sampah di Kota Bandung.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi pengelolaan sampah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kang Pisman <a href="http://www.kabar58.com/2021/02/kang-pisman-bawa-kota-bandung-raih.html">http://www.kabar58.com/2021/02/kang-pisman-bawa-kota-bandung-raih.html</a></li> <li>2. Pengurangan angka tonase sampah Kota Bandung. <a href="https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79714020/tonase-sampah-dari-kota-bandung-ke-tpa-berkurang?page=all">https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79714020/tonase-sampah-dari-kota-bandung-ke-tpa-berkurang?page=all</a></li> <li>3. <i>Transfer Knowledge</i> dan Transfer Teknologi. Kegiatan sosialisasi dan Penggunaan Biodigester untuk mengatasi</li> </ol>

		<p>permasalahan sampah di Kota Bandung.</p> <p><a href="http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19052/8.BAB%20IV.pdf?sequence=8&amp;isAllowed=y">http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19052/8.BAB%20IV.pdf?sequence=8&amp;isAllowed=y</a></p>
--	--	--

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian



*Diolah Oleh Niken Ayu Woro Hapsari*